

RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
TAHUN ANGGARAN : 2023

A. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

B. VISI : Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong

C. MISI

- : 01 Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
- : 02 Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan
- : 03 Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal
- : 04 Menyelenggarakan transmigrasi
- : 05 Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat
- : 06 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
- : 07 Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik

D. FUNGSI : 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

: 10 PENDIDIKAN

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2023	2024	2025	2026
	<b><u>Sasaran Strategis</u></b> Berkembangnya status pembangunan desa				
	<b><u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u></b> Jumlah desa mandiri	5444	6444		
	<b><u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u></b> Jumlah desa berkembang	58.291	59.291		
	<b><u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u></b> Jumlah desa tertinggal	11.652	9.152		
	<b><u>Sasaran Strategis</u></b> Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan				
	<b><u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u></b> Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	57,2	58,70		
	<b><u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u></b> Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian	55,5	57,00	0	
	<b><u>Sasaran Strategis</u></b> Menurunnya angka kemiskinan di perdesaan				
	<b><u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u></b> Persentase kemiskinan di perdesaan	10,80	9,90		

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2023	2024	2025	2026
	<b>Sasaran Strategis</b> Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Jumlah BUM Desa berkembang	9.000	10000		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Jumlah BUM Desa maju	1.450	1.800		
	<b>Sasaran Strategis</b> Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang	270	300		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju	175	200		
	<b>Sasaran Strategis</b> Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2	2,5		
	<b>Sasaran Strategis</b> Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	55,31	57,50		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Rata-rata nilai indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	44,08	46,10	0	
	<b>Sasaran Strategis</b> Berkurangnya jumlah daerah tertinggal				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Jumlah kabupaten yang termasuk daerah tertinggal	N/A	37 (25 Kab.		
	<b>Sasaran Strategis</b> Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	24,26	23,75		
	<b>Sasaran Strategis</b> Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal	61,50	62,20		
	<b>Sasaran Strategis</b> Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	85	90		

KODE	URAIAN	TARGET KINJERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2023	2024	2025	2026
	<p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p>Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan</p> <p><b>Sasaran Strategis</b></p> <p>Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p>Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, PDTT</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p>Indeks kesehatan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p>Indeks Penerapan Sistem Merit Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p>Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</p> <p><b>Sasaran Strategis</b></p> <p>Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p>Nilai SAKIP Kementerian Desa, PDTT</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p>Opini BPK RI atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p>Nilai Integritas Organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p>Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</p> <p><b>Sasaran Strategis</b></p> <p>Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p>Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p>Persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi</p>	90	90		
		100	100	0	
		100	100		
		0,80	0,85	0	
		4	4	0	
		78	80		
		WTP	WTP		
		80	85		
		3	3		
		90	90		
		90	95	0	
067.02	<b>Eselon 1</b> Inspektorat Jenderal	49,674,000	51,171,392	52,713,678	54,302,292
WA	Program Program Dukungan Manajemen	49,674,000	51,171,392	52,713,678	54,302,292

	<p><b>Sasaran Program</b> Meningkatnya pengawasan, pengendalian mutu dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif</p> <p><b>Indikator Kinerja Program</b></p> <p>Persentase rekomendasi Kebijakan (policy recommendation) yang ditindaklanjuti</p> <p>Tingkat penerapan pengendalian intern</p> <p>Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM</p> <p>Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian</p> <p>Persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi yang ditindaklanjuti</p> <p>Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Kemendesa PDFT</p> <p>Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi Anggaran Kemendesa PDFT</p> <p>Tingkat kapabilitas APIP</p> <p>Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)</p>	45	50	50	
		3	3	3	
		1	1	1	
		88	90	90	
		45	50	50	
		= 3%	= 3%	= 3%	
		= 3%	= 3%	= 3%	
		3	3	3	
		72	73	74	
6456	<p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya Inspektorat Jenderal yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Itjen</li> <li>- Persentase pejabat struktural dan fungsional tertentu yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</li> <li>- Persentase terpenuhinya jumlah Auditor sesuai beban kerja</li> <li>- Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I</li> <li>- Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal</li> <li>- Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal</li> <li>- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal</li> <li>- Tingkat penerapan pengendalian intern Inspektorat Jenderal</li> <li>- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Inspektorat Jenderal yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</li> </ul> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya pelayanan publik Inspektorat Jenderal yang berkualitas</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kepuasan aparatur lingkup Inspektorat Jenderal atas dukungan manajemen</li> </ul>	36,074,000	37,142,516	38,243,080	39,376,697
		88 Persen (%)	89 Persen (%)	90 Persen (%)	0 Persen (%)
		90 Persen (%)	95 Persen (%)	95 Persen (%)	0 Persen (%)
		65 Persen (%)	70 Persen (%)	75 Persen (%)	0 Persen (%)
		PIE Nilai	PIE Nilai	PIE Nilai	0 Nilai
		84 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	0 Nilai
		84 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	0 Nilai
		90 Nilai	90 Nilai	90 Nilai	0 Nilai
		3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	0 Nilai
		2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	0 Kebijakan
		4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai	0 Nilai

CAN	<u>KRO</u> Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	835,700	857,645	880,248	903,529
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	27,294,633	28,980,955	29,857,095	30,759,532
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBB	<u>KRO</u> Layanan Sarana dan Prasarana Internal	316,300	29,309,870	30,199,003	31,114,823
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBC	<u>KRO</u> Layanan Manajemen SDM Internal	3,418,700	32,821,985	33,807,328	34,822,255
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBD	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,208,667	37,142,516	38,243,080	39,376,697
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
6457	<u>KEGIATAN</u> Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	13,600,000	14,028,876	14,470,598	14,925,595
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Terwujudnya pengawasan internal, investigasi khusus, dan pengawasan penggunaan Dana Desa yang baik				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Persentase rekomendasi Kebijakan (policy recommendation) yang ditindaklanjuti di UKE-1	45 Persen (%)	50 Persen (%)	50 Persen (%)	0 Persen (%)
	- Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di UKE-1	45 Persen (%)	50 Persen (%)	50 Persen (%)	0 Persen (%)
	- Tingkat Penerapan Pengendalian Intern UKE-1	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	0 Nilai
	- Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran UKE-1	? 3% Persen (%)	? 3% Persen (%)	? 3% Persen (%)	0 Persen (%)
	- Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di UKE-1	88 Persen (%)	90 Persen (%)	90 Persen (%)	0 Persen (%)
	- Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit
	- Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi Anggaran UKE-1	? 3% Persen	? 3% Persen	? 3% Persen	0 Persen
	- Persentase rekomendasi Kebijakan (policy recommendation) atas hasil investigasi khusus yang ditindaklanjuti	45 Persen	50 Persen	50 Persen	0 Persen
	- Persentase rekomendasi Kebijakan (policy recommendation) atas hasil pengawasan dana desa yang ditindaklanjuti	45 Persen	50 Persen	50 Persen	0 Persen
	- Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80 Persen	90 Persen	90 Persen	0 Persen
EBD	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	13,600,000	14,028,876	14,470,598	14,925,595
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
067.03	<u>Eselon 1</u> Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	234,356,528	239,485,037	244,767,430	250,208,344

CT	<b>Program</b> Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	174,556,528	177,881,337	181,305,916	184,833,255
	<b>Sasaran Program</b> Terpenuhinya indeks desa yang berkembang dan mandiri <b>Indikator Kinerja Program</b> Rata-rata Indeks Desa Berkembang menjadi Mandiri  Rata-rata Indeks Desa Tertinggal menjadi Berkembang	0.79  0.58	0.81  0.59		
	<b>Sasaran Program</b> Terpenuhinya indeks pembangunan kawasan perdesaan yang berkembang, mandiri, dan berdaya saing <b>Indikator Kinerja Program</b> Rata-rata perkembangan indeks 10 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Inisiasi menjadi Konsolidasi  Rata-rata perkembangan indeks 47 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) konsolidasi menjadi mandiri  Rata-rata perkembangan indeks 5 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) mandiri menjadi berdaya saing  Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian	24,63  51,45  75,68  51.45	26,00  53,85  78,12  53.85		
	<b>Sasaran Program</b> Menurunnya angka kemiskinan desa <b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase penurunan angka kemiskinan desa	10,8	9,9		
	<b>Sasaran Program</b> Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan desa dan perdesaan <b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di Desa dan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan  Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Desa dan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	70  70	80  80		
6468	<b>KEGIATAN</b> Pembangunan Desa dan Perdesaan  <b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah dokumen rencana teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan <b>SASARAN KEGIATAN</b> Terpenuhinya indeks Desa yang berkembang dan mandiri  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa <b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi pembangunan sarana dan prasarana Desa dan Perdesaan  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	134,556,528   4 Dokumen  1 Dokumen	136,681,338   4 Dokumen  1 Dokumen	138,869,920   0 Dokumen  0 Dokumen	141,124,180   0 Dokumen  0 Dokumen

<p>- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan yang ditetapkan <b>SASARAN KEGIATAN</b> Terpenuhinya prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan</p>	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan fungsional <b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan</p>	90 Persen (%)	90 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan <b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya regulasi dan kebijakan, pelaksanaan advokasi dan kerjasama desa dan perdesaan</p>	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan yang ditetapkan <b>SASARAN KEGIATAN</b> Terselenggaranya pelaksanaan advokasi dan kerjasama desa dan perdesaan</p>	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase kegiatan pelaksanaan advokasi dan kerjasama desa dan perdesaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan teknis pengembangan kerjasama desa dan perdesaan <b>SASARAN KEGIATAN</b> Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan perdesaan melalui pendampingan</p>	100 Persen (%)	100 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase desa dan perdesaan yang mendapatkan pendampingan <b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Desa dan Perdesaan</p>	100 Persen (%)	100 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa yang ditetapkan <b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas</p>	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase desa yang memanfaatkan dana desa sesuai dengan prioritas <b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya layanan informasi publik pemanfaatan Dana Desa yang baik</p>	100 Persen (%)	100 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase desa yang laporan pemanfaatan dana desanya terpublikasi <b>SASARAN KEGIATAN</b> Terpenuhinya indeks pembangunan kawasan perdesaan yang berkembang, mandiri, dan berdaya saing</p>	100 Persen (%)	100 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi status perkembangan Kawasan Perdesaan <b>SASARAN KEGIATAN</b> Terpenuhinya Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan</p>	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase kegiatan Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yang bermanfaat bagi</p>	80 Persen (%)	90 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)

	masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan				
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>				
	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan desa dan perdesaan				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di desa dan perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	80 Persen (%)	90 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
	- Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/M yang dialokasikan di kawasan perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	70 Persen (%)	80 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
	<b>KRO</b>				
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,000,000	1,029,996	1,060,896	1,092,724
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	2,683,000	3,803,408	3,927,439	4,055,194
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
AEA	Koordinasi	1,317,000	5,150,276	5,305,071	5,464,515
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6,071,972	11,382,218	11,701,784	12,030,943
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	910,000	12,331,549	12,691,623	13,062,511
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,428,028	13,830,189	14,262,992	14,708,792
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
FBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	4,500,000	18,484,832	19,076,922	19,686,784
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4,500,000	23,111,314	23,833,685	24,577,740
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Aparatur Pemerintah Desa yang ditingkatkan kapasitasnya dalam perencanaan penanggulangan bencana	420 Orang	420 Orang	420 Orang	
	- Jumlah Fasilitator Pendamping Pembangunan Kawasan Perdesaan	62 Orang	62 Orang	62 Orang	
	- Jumlah Masyarakat Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	185 Orang	185 Orang	185 Orang	
	- Jumlah Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa yang ditingkatkan kapasitasnya di Daerah Rawan Konflik di	100 Orang	100 Orang	100 Orang	

	Daerah tertinggal				
	- Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemulihan ekonomi pasca bencana	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
	- Jumlah Pelaku Wisata di Daerah Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya	2155 Orang	2155 Orang	2155 Orang	
	- Jumlah Pendamping Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan kemampuannya dalam bidang Media dan Pembelajaran Pembangunan Kawasan Perdesaan	62 Orang	62 Orang	62 Orang	
	- Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka advokasi dan kerja sama	1009 Orang	1054 Orang	1054 Orang	
	- Jumlah pendamping desa yang ditingkatkan kapasitas	35340 Orang	35340 Orang	35340 Orang	
	<b><u>KRO</u></b>				
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	11,884,368	35,245,379	36,224,938	37,233,900
	<b><u>INDIKATOR KRO</u></b>				
	<b><u>KRO</u></b>				
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3,500,000	38,848,232	39,933,735	41,051,818
	<b><u>INDIKATOR KRO</u></b>				
	<b><u>KRO</u></b>				
RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	13,341,000	52,554,510	54,016,251	55,521,858
	<b><u>INDIKATOR KRO</u></b>				
	<b><u>KRO</u></b>				
RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	75,721,160	128,735,342	130,670,548	132,663,827
	<b><u>INDIKATOR KRO</u></b>				
	<b><u>KRO</u></b>				
RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	6,700,000	135,636,341	137,778,577	139,985,097
	<b><u>INDIKATOR KRO</u></b>				
	<b><u>KRO</u></b>				
UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	1,000,000	136,681,338	138,869,920	141,124,180
	<b><u>INDIKATOR KRO</u></b>				
	<b><u>KEGIATAN</u></b>				
6474	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	40,000,000	41,199,999	42,435,996	43,709,075
	<b><u>SASARAN KEGIATAN</u></b> Terpenuhinya Pengembangan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Desa dan Perdesaan				
	<b><u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u></b>				
	- Persentase kegiatan Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan perencanaan	75 Persen (%)	80 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)

UBB	<b>KRO</b> Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa  <b>INDIKATOR KRO</b>	40,000,000	41,199,999	42,435,996	43,709,075
WA	Program Program Dukungan Manajemen	59,800,000	61,603,700	63,461,514	65,375,089
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan <b>Indikator Kinerja Program</b>				
	<b>Sasaran Program</b> Terwujudnya Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi <b>Indikator Kinerja Program</b> Nilai SAKIP Ditjen Pembangunan Desa dan perdesaan	77	78		
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan <b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	88	90		
6461	<b>KEGIATAN</b> Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan  <b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya regulasi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan <b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen Pembangunan Desa dan perdesaan - Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun - Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun <b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya pelayanan publik Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkualitas  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan <b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Opini atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I - Nilai SAKIP Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	59,800,000	61,603,700	63,461,514	65,375,089
		5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
		88 Persen (%)	90 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
		80 Persen (%)	80 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
		80 Persen (%)	80 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
		4 Nilai	4 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
		PIE Opini	PIE Opini	0 Opini	0 Opini
		77 Nilai	78 Nilai	0 Nilai	0 Nilai

	- Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	83 Nilai	84 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
	- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	94 Nilai	95 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
	- Tingkat penerapan pengendalian intern Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	4 Nilai	4 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
	<b>KRO</b>				
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	500,000	515,000	530,450	546,363
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	40,582,628	42,320,481	43,595,504	44,908,779
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	500,000	42,835,481	44,125,954	45,455,142
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	12,768,625	55,998,258	57,694,708	59,442,057
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,448,747	61,603,700	63,461,514	65,375,089
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>Eselon 1</b>				
067.04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	230,459,248	234,224,613	238,102,894	242,097,607
	<b>Program</b>				
CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	177,182,477	179,404,743	181,693,637	184,051,268
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi				
	<b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2,0	2,5		
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya status BUM Desa yang berkembang dan maju				
	<b>Indikator Kinerja Program</b> Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berkembang	9000	10.000		
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju	1450	1800		
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya status Bumdesma yang berkembang dan maju				
	<b>Indikator Kinerja Program</b> Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Berkembang	270	300	300	
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Maju	175	200	200	

6469	<p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah dokumen perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Terbangunnya Komitmen Lintas K/L/D/M dalam Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase afirmasi rencana program/kegiatan internal Kemendes PDTT yang dialokasikan untuk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Dokumen Perencanaan teknis</p> <p>- Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan untuk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Dokumen Perencanaan Teknis</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Terukurnya perkembangan Ekonomi dan Investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan Ekonomi dan Investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan</p> <p>- Persentase kebijakan, regulasi dan deregulasi kelembagaan pengembangan ekonomi dan investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan</p> <p>- Persentase pembentukan dan peningkatan Kapasitas lembaga ekonomi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Terlayannya investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan Investasi Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Prima</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kebijakan dan regulasi pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya produk unggulan Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang memiliki keunggulan berdaya saing</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sudah mengembangkan produk unggulan</p> <p>- Persentase Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah meningkatkan nilai tambah produk unggulan</p>	177,182,477	179,404,743	181,693,637	184,051,268
		4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
		100 Persen (%)	100 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
		80 Persen (%)	90 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
		5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi
		100 Persen	100 Persen	0 Persen	0 Persen
		80 Persen	80 Persen	0 Persen	0 Persen
		3 Nilai	3 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
		5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi
		90 Persen (%)	100 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
		90 Persen (%)	100 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)

	<p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kebijakan dan regulasi Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditetapkan</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya promosi produk unggulan Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (termasuk product and region branding)</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase promosi produk unggulan Desa , Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (termasuk product and region branding) yang diimplementasikan sesuai dengan perencanaan</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya volume produk unggulan yang dapat dipasarkan baik ditingkat pasar domestik maupun Internasional</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase Kenaikan Volume Penjualan Produk Unggulan Perdesaan yang dipasarkan secara konvensional dan platform digital</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kebijakan dan regulasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Terpenuhinya indeks perkembangan BUMDES dan BUMDESMA</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perkembangan BUMDES dan BUMDESMA</p>				
		5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi
		60 Persen (%)	60 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
		20 Persen (%)	25 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
		5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi
		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen
AEA	<p><b>KRO</b> Koordinasi</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	3,810,600	3,919,012	4,030,674	4,145,694
AEC	<p><b>KRO</b> Kerja sama</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	5,572,781	9,667,837	9,960,827	10,262,614
AEE	<p><b>KRO</b> Kemitraan</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	1,200,000	10,903,834	11,233,902	11,573,880
AEH	<p><b>KRO</b> Promosi</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	1,863,850	12,821,805	13,207,615	13,605,008
AFA	<p><b>KRO</b> Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	3,644,039	16,526,306	16,974,386	17,435,929

BEC	<u>KRO</u> Bantuan Produk	2,300,000	18,895,303	19,414,452	19,949,195
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
FAE	<u>KRO</u> Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	333,730	19,244,032	19,778,631	20,329,287
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
QDC	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1,500,000	20,789,029	21,369,975	21,968,371
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
QDD	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	72,200,000	93,039,518	93,672,470	94,324,437
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
QDH	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	79,207,477	173,753,486	175,938,082	178,188,288
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
QEH	<u>KRO</u> Bantuan Kelompok Masyarakat	4,300,000	178,139,948	180,413,603	182,755,534
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
RAG	<u>KRO</u> Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1,250,000	179,404,743	181,693,637	184,051,268
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
WA	<b>Program</b> Program Dukungan Manajemen	53,276,771	54,819,870	56,409,257	58,046,339
	<b>Sasaran Program</b> Terwujudnya Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi <b>Indikator Kinerja Program</b> Nilai SAKIP Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	78	80		
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi <b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di ditjen pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	88	90		
6462	<u>KEGIATAN</u> Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	53,276,771	54,819,870	56,409,257	58,046,339

	<p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen Pengembangan Ekonomi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I</li> <li>- Nilai SAKIP Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi</li> <li>- Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi</li> <li>- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi</li> <li>- Tingkat penerapan pengendalian intern Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi</li> </ul>	PIE PIE	PIE PIE	0 PIE	0 PIE
		78 Nilai	80 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
		91 Nilai	92 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
		95 Nilai	95 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
		4 Nilai	4 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
	<p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya pelayanan publik Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang berkualitas</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi atas dukungan manajemen</li> </ul>	4 Nilai	4 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
	<p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di ditjen pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</li> <li>- Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</li> <li>- Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</li> </ul>	88 Persentase	90 Persentase	0 Persentase (%)	0 Persentase (%)
		80 Persentase	80 Persentase	0 Persentase (%)	0 Persentase (%)
		80 Persentase	80 Persentase	0 Persentase (%)	0 Persentase (%)
	<p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Ivestasi Perdesaan</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Ivestasi Perdesaan yang ditetapkan</li> </ul>	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi
EBA	<p><b>KRO</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal</p>	45,906,500	47,243,031	48,619,657	50,037,592
	<p><b>INDIKATOR KRO</b></p>				
EBC	<p><b>KRO</b> Layanan Manajemen SDM Internal</p>	5,633,290	53,042,870	54,591,040	56,185,667
	<p><b>INDIKATOR KRO</b></p>				
EBD	<p><b>KRO</b> Layanan Manajemen Kinerja Internal</p>	1,736,981	54,819,870	56,409,257	58,046,339
	<p><b>INDIKATOR KRO</b></p>				
067.06	<p><b>Eselon 1</b> Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</p>	90,564,634	92,989,574	95,487,295	98,060,017
CT	<p>Program Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi</p>	39,672,768	40,616,024	41,587,607	42,588,385

	<b>Sasaran Program</b> Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Daerah Tertinggal <b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase afirmasi program/kegiatan hasil koordinasi internal dan eksternal K/L/D/M dalam dokumen perencanaan PPDT yang diimplementasikan	70	75	75	75
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya daerah tertinggal yang potensi terentaskan sesuai dengan indeks ketertinggalan <b>Indikator Kinerja Program</b> Rata-rata Perkembangan Indeks 62 Kabupaten Daerah Tertinggal	53,39	53,95	53,95	53,95
	<b>Sasaran Program</b> Menurunnya jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal <b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal  Nilai Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal	24,26  61,5	23,75  62,2	23,75  62,2	23,75  62,2
6470	<b>KEGIATAN</b> <b>Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal</b>  <b>SASARAN KEGIATAN</b> Keseserasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen Perencanaan PPDT - Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen Perencanaan PPDT - Jumlah dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal  <b>SASARAN KEGIATAN</b> Keseserasian pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana daerah tertinggal  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT bidang prasarana dan sarana yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT - Persentase afirmasi K/L/D/M di daerah tertinggal dalam bidang prasarana dan sarana yang dialokasikan di daerah tertinggal dalam bentuk dokumen perencanaan PPDT  <b>SASARAN KEGIATAN</b> Keseserasian pelaksanaan pembangunan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT bidang Sosial Budaya dan kelembagaan yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT - Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M bidang Sosial Budaya dan kelembagaan yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen Perencanaan PPDT  <b>SASARAN KEGIATAN</b> Keseserasian pelaksanaan pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan daerah tertinggal  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT bidang Penyerasian pemanfaatan SDA dan lingkungan yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT - Persentase K/L/D/M di daerah tertinggal dalam bidang	39,672,768	40,616,024	41,587,607	42,588,385
		75 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)
		75 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)
		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		75 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)
		75 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)
		60 Persen (%)	68 Persen (%)	70 Persen (%)	75 Persen (%)
		60 Persen (%)	68 Persen (%)	70 Persen (%)	72 Persen (%)
		50 Persen (%)	50 Persen (%)	50 Persen (%)	50 Persen (%)
		50 Persen (%)	50 Persen (%)	50 Persen (%)	50 Persen (%)

	<p>pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan yang dialokasikan di daerah tertinggal dalam bentuk dokumen perencanaan PPDT</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Terwujudnya Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase daerah perbatasan di daerah tertinggal yang dikembangkan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT</li> <li>- Persentase daerah pulau-pulau kecil terluar di daerah tertinggal yang dikembangkan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT</li> <li>- Persentase kawasan strategis prioritas nasional di daerah tertinggal yang dikembangkan sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT</li> </ul> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Tersedianya dokumen rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditetapkan</li> <li>- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Daerah Tertinggal yang ditetapkan</li> <li>- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal yang ditetapkan</li> <li>- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pemanfaatan SDA dan Lingkungan di Daerah Tertinggal yang ditetapkan</li> <li>- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal yang ditetapkan</li> </ul>	75 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)
		75 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)
		75 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)
		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen
		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
AEA	<b>KRO</b> Koordinasi	2,978,680	3,058,380	3,140,469	3,225,029
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Terselenggara dalam Keserasian Pelaksanaan Pemanfaatan SDA dan Lingkungan di Daerah Tertinggal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
AEC	<b>KRO</b> Kerja sama	7,259,643	10,490,576	10,750,401	11,018,048
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Jumlah Dokumen Kesepakatan Lintas K/L/D/M dalam Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang Disepakati	8 Kesepakatan	8 Kesepakatan	8 Kesepakatan	8 Kesepakatan
	- Jumlah Kerjasama yang Terselenggara dalam Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Khusus	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
	- Jumlah Kesepakatan Lintas K/L dan Pemda dalam rangka Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan
	- Jumlah dokumen kesepakatan lintas K/L dan pemda dalam rangka penyerasian pembangunan sosial, budaya dan kelembagaan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan
PBP	<b>KRO</b> Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	1,450,000	11,968,706	12,257,509	12,555,007
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Tahunan PPDT yang Disusun, Ditetapkan dan Dievaluasi	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan
PEA	<b>KRO</b> Koordinasi	500,000	12,469,426	12,758,970	13,057,232
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Jumlah Bahan Kebijakan terkait Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi yang disusun di Daerah Tertinggal	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan
	- Jumlah Kegiatan Penyerasian Sarana dan Prasarana Bidang Energi di Daerah Tertinggal	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan

QDC	<b>KRO</b> Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	9,060,609	21,780,928	22,328,915	22,893,389
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Jumlah Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	80 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang
	- Jumlah Masyarakat di Daerah Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir	320 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang
	- Jumlah Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Mengenai Pengembangan Internet Desa Berbasis Komunitas	60 Orang	120 Orang	160 Orang	240 Orang
	- Jumlah Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan di Daerah Khusus	180 Orang	180 Orang	180 Orang	
	- Jumlah Tenaga Kerja Bidang Ekonomi di DT yang Ditingkatkan Kapasitasnya	240 Orang	310 Orang	380 Orang	455 Orang
	- Jumlah Tenaga Kerja Bidang Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	240 Orang	280 Orang	320 Orang
	- Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pendidikan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	135 Orang	155 Orang	176 Orang	195 Orang
RAG	<b>KRO</b> Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6,025,983	27,914,159	28,572,611	29,250,862
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Jumlah Sarana Pasca Panen Komoditas Pertanian yang Disediakan di Daerah Khusus dalam rangka Mendukung Green Economy Growth	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
	- Jumlah Sarana Pasca Panen Komoditas Pertanian yang Disediakan di Daerah Pulau-pulau Kecil dan Pulau Terluar	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	- Jumlah Sarana Pengelolaan Kawasan Pesisir yang Diberikan Kepada Masyarakat di Daerah Tertinggal	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Produksi Hasil Prukades yang disediakan di Daerah Tertinggal	3 Unit	6 Unit	9 Unit	12 Unit
RAL	<b>KRO</b> Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	674,349	28,608,265	29,287,065	29,986,278
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
RBC	<b>KRO</b> Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	4,154,527	32,894,705	33,709,375	34,548,536
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Panjang jalan desa strategis di kawasan perbatasan yang dibangun/ditingkatkan	0,97 Km	2 Km	2 Km	
RBG	<b>KRO</b> Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	6,748,104	39,768,083	40,711,786	41,683,849
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Jumlah Prasarana Air Bersih yang Dibangun di Daerah Tertinggal	6 Unit	10 Unit	13 Unit	16 Unit
RBN	<b>KRO</b> Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	820,873	40,616,024	41,587,607	42,588,385
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Jumlah Prasarana Pengembangan Potensi Sumber Daya Pariwisata yang Dibangun di Daerah Pulau-pulau Kecil dan Pulau Terluar	2 Unit	4 Unit	6 Unit	8 Unit
WA	<b>Program</b> Program Dukungan Manajemen	50,891,866	52,373,550	53,899,688	55,471,632
	<b>Sasaran Program</b> Terwujudnya Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi <b>Indikator Kinerja Program</b> Nilai SAKIP Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	90	95	95	95
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal				

	<b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal	88	90	90	90
6463	<b>KEGIATAN</b> <b>Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</b>	<b>50,891,866</b>	<b>52,373,550</b>	<b>53,899,688</b>	<b>55,471,632</b>
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Penyesuaian Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I	4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai
	- Nilai SAKIP Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	83 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	84 Nilai
	- Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	87 Nilai	88 Nilai	88 Nilai	88 Nilai
	- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	89 Nilai	90 Nilai	90 Nilai	90 Nilai
	- Tingkat penerapan pengendalian intern Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	3,2 Nilai	3,4 Nilai	3,4 Nilai	3,4 Nilai
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya dokumen rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditetapkan	2 Bahan	2 Bahan	2 Bahan	2 Bahan
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal	88 Persen (%)	90 Persen (%)	90 Persen (%)	90 Persen (%)
	- Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	65 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)
	- Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	58 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)	80 Persen (%)
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya pelayanan publik Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berkualitas				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	3,2 Nilai	3,3 Nilai	3,4 Nilai	3,4 Nilai
EBA	<b>KRO</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal	41,864,221	43,094,610	44,361,914	45,667,257
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan
EBC	<b>KRO</b> Layanan Manajemen SDM Internal	7,522,125	50,842,135	52,341,600	53,886,067
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Jumlah pegawai yang dilakukan manajemen SDM internal	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang

EBD	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,505,520	52,373,550	53,899,688	55,471,632
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah dokumen manajemen kinerja internal	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
067.07	<u>Eselon 1</u> Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	251,553,559	255,796,865	261,559,599	267,495,429
CT	Program Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	174,053,559	176,318,933	180,044,346	183,881,702
	<b>Sasaran Program</b> Terpenuhinya indeks pembangunan kawasan transmigrasi mandiri dan berdaya saing <b>Indikator Kinerja Program</b> Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	55,31	57,50		
	Rata-rata nilai indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi	39.78	40.28		
	<b>Sasaran Program</b> Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi <b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase afirmasi kegiatan hasil koordinasi eksternal K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen anggaran	70	75		
6471	<u>KEGIATAN</u> Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	174,053,559	176,318,933	180,044,346	183,881,702
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	5000 Ha	5000 Ha	0 Ha	0 Ha
	- Jumlah dan luasan bidang tanah dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	500 Ha	500 Ha	0 Ha	0 Ha
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Terukurnya perkembangan kawasan transmigrasi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	0 Dokumen
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Terpenuhinya indeks perkembangan Kawasan Transmigrasi yang berkembang, mandiri, dan berdaya saing				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi status perkembangan Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kebijakan dan regulasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Kawasan Transigrasi yang ditetapkan	5 Kebijakan &	5 Kebijakan &	0 Kebijakan &	0 Kebijakan &
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di kawasan	80 Persen	80 Persen	0 Persen	0 Persen

<p>transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)</p> <p>- Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di kawasan transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi</p>	70 Persen	70 Persen	0 Persen	0 Persen
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Jumlah kebijakan dan regulasi pembangunan kawasan transmigrasi yang ditetapkan</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Tersedianya kebijakan dan regulasi Penataan Persebaran Penduduk</p>	13 Kebijakan	13 Kebijakan	0 Kebijakan	0 Kebijakan
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Jumlah kebijakan dan regulasi Penataan Persebaran Penduduk</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Tersedianya kebijakan dan regulasi pengembangan Satuan Permukiman</p>	4 Kebijakan &	4 Kebijakan &	0 Kebijakan &	0 Kebijakan &
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang ditetapkan</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Tersedianya Dokumen Rencana Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi</p>	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Terbangunnya kawasan transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM</p>	6 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Jumlah kawasan transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Tertatanya Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi yang serasi dan seimbang Sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan</p>	11 Kawasan	10 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Jumlah Penduduk yang difasilitasi penataannya di permukiman transmigrasi sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan</p>	200 KK	200 KK	0 KK	0 KK
<p>- Jumlah permukiman transmigrasi yang tersusun profil persebaran penduduknya</p>	10 SP	10 SP	0 SP	0 SP
<p>- Jumlah penduduk yang difasilitasi perpindahannya sebagai transmigran sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Berkembangnya Satuan Permukiman Transmigrasi</p>	200 KK	200 KK	0 KK	0 KK
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Persentase SP dengan status pemantapan</p>	60 Persentase	60 Persentase	0 Persentase (%)	0 Persentase (%)
<p>- Persentase SP dengan status kemandirian</p>	45 Persentase	45 Persentase	0 Persentase (%)	0 Persentase (%)
<p>- Persentase jumlah transmigran yang sudah menerima SHM pada tahun ke-5</p>	60 Persentase	60 Persentase	0 Persentase (%)	0 Persentase (%)
<p>- Persentase SP dengan status penyesuaian</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Terwujudnya Kawasan Perkotaan Baru sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi dan terwujudnya konektivitas antar SKP dalam kawasan transmigrasi</p>	50 Persentase	50 Persentase	0 Persentase (%)	0 Persentase (%)
<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Rata-rata indeks SKP kawasan transmigrasi dari cukup berkembang menjadi berkembang</p>	63,30 Nilai	71.5 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
<p>- Rata-rata indeks KPB untuk 7 kawasan transmigrasi dari mandiri menjadi berdaya saing</p>	69,90 Nilai	69 Nilai	0 Nilai	0 Nilai

	- Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru yang memenuhi standar sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi sesuai dengan perencanaan	66 Persen	66 Persen	0 Persen	0 Persen
	- Persentase pelaksanaan program/kegiatan pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan sesuai dengan dokumen perencanaan	9 Persen	9 Persen	0 Persen	0 Persen
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase afirmasi kegiatan hasil koordinasi eksternal K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen anggaran	50 Persentase	50 Persentase	0 Persentase (%)	0 Persentase (%)
	<b>KRO</b>				
ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	568,275	585,561	603,368	621,710
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	- Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4 Rekomendasi/Kebijakan	4 Rekomendasi/Kebijakan	4 Rekomendasi/Kebijakan	4 Rekomendasi/Kebijakan
	<b>KRO</b>				
AEA	Koordinasi	120,620	711,373	734,529	758,380
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
AEC	Kerja sama	369,336	1,094,026	1,130,900	1,168,881
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2,683,043	3,792,384	3,845,030	3,899,258
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
BCC	Perkara Hukum Kelompok Masyarakat	1,536,254	5,370,225	5,465,714	5,564,075
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,809,444	9,264,780	9,447,869	9,636,498
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	15,329,482	25,046,026	25,694,368	26,362,317
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
BDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	12,647,785	37,992,571	38,948,617	39,933,528
	<b>INDIKATOR KRO</b>				

BEG	<u>KRO</u> Bantuan Peralatan / Sarana	2,810,039	40,838,744	41,832,013	42,855,260
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
CAI	<u>KRO</u> Sarana Pengembangan Kawasan	10,508,777	51,567,001	52,786,348	54,042,454
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
CBC	<u>KRO</u> Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	13,745,750	65,006,070	66,497,417	68,033,678
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
CBF	<u>KRO</u> Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	6,958,173	72,075,325	73,681,096	75,335,210
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
CBO	<u>KRO</u> Prasarana Pengembangan Kawasan	539,133	72,631,453	74,254,727	75,926,872
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
CBS	<u>KRO</u> Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	1,482,875	73,666,378	75,323,495	77,030,496
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
FAE	<u>KRO</u> Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3,619,286	77,381,075	79,136,468	80,944,691
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
PBP	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4,808,024	82,241,092	84,050,038	85,913,421
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
QDC	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4,493,085	86,827,697	88,732,986	90,695,606
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
QEB	<u>KRO</u> Bantuan Keluarga	11,542,295	98,697,064	100,939,229	103,248,843
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	- Jumlah kepala keluarga yang mendapatkan bantuan catu pangan	874 Kepala Keluarga	949 Kepala Keluarga	949 Kepala Keluarga	
QEG	<u>KRO</u> Bantuan Peralatan / Sarana	6,959,891	105,853,243	108,297,602	110,815,479
	<u>INDIKATOR KRO</u>				

RAI	<u>KRO</u> Sarana Pengembangan Kawasan  <u>INDIKATOR KRO</u>	29,485,296	135,780,879	138,680,879	141,668,057
RBC	<u>KRO</u> Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)  <u>INDIKATOR KRO</u>	25,108,951	161,061,426	164,447,179	167,934,679
RBF	<u>KRO</u> Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)  <u>INDIKATOR KRO</u>	8,609,370	169,878,858	173,478,918	177,187,157
RBO	<u>KRO</u> Prasarana Pengembangan Kawasan  <u>INDIKATOR KRO</u>	2,422,973	172,349,579	175,998,820	179,757,716
RBS	<u>KRO</u> Prasarana Jaringan Sumber Daya Air  <u>INDIKATOR KRO</u>	2,066,466	174,469,474	178,173,750	181,989,332
UBA	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah  <u>INDIKATOR KRO</u>	1,828,936	176,318,933	180,044,346	183,881,702
WA	Program Program Dukungan Manajemen	77,500,000	79,477,932	81,515,253	83,613,727
	<b>Sasaran Program</b> Terwujudnya Ditjen Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi <b>Indikator Kinerja Program</b> Nilai sikip Ditjen Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi	82	83		
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi <b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi	88	90		
6464	<u>KEGIATAN</u> Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi  <u>SASARAN KEGIATAN</u> Terwujudnya pelayanan publik Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berkualitas  <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen	77,500,000	79,477,932	81,515,253	83,613,727
		4 Sangat Baik	4 Sangat Baik	0 Sangat Baik	0 Sangat Baik

	<p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya Kebijakan dan Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan</p>	5	5	0	0
	<p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Opini atas pengendalian internal atas laporan keuangan dan BMN Ditjen PPKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi APIP/Tim Penilai PIPK UKE I</p>	PIE Opini	PIE Opini	0 Opini	0 Opini
	- Nilai SAKIP Ditjen PPKTrans	82 Nilai	82.5 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
	- Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PPKTrans	91 Nilai	92 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
	- Nilai atas indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PPKTrans	95 Nilai	95 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
	- Tingkat penerapan pengendalian intern Ditjen PPKTrans	3 Level	3 Level	0 Level	0 Level
	<p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen PPKTrans</p>	88 Persentase	90 Persentase	0 Persentase (%)	0 Persentase (%)
	- Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	90 Persentase	95 Persentase	0 Persentase (%)	0 Persentase (%)
	- Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	90 Persentase	95 Persentase	0 Persentase (%)	0 Persentase (%)
CAN	<p><b>KRO</b> Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>	500,000	523,700	548,111	573,254
	<p><b>INDIKATOR KRO</b> - Jumlah Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi</p>	20 Unit	20 Unit	20 Unit	
EBA	<p><b>KRO</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal</p>	61,626,270	63,988,550	65,906,758	67,882,526
	<p><b>INDIKATOR KRO</b> - Layanan Dukungan Manajemen Internal</p>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
EBB	<p><b>KRO</b> Layanan Sarana dan Prasarana Internal</p>	360,000	64,366,550	66,303,298	68,298,162
	<p><b>INDIKATOR KRO</b> - Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal</p>	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
EBC	<p><b>KRO</b> Layanan Manajemen SDM Internal</p>	10,781,700	75,148,250	77,084,998	79,079,862
	<p><b>INDIKATOR KRO</b> - Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal</p>	293 Orang	293 Orang	293 Orang	
EBD	<p><b>KRO</b> Layanan Manajemen Kinerja Internal</p>	4,232,030	79,477,932	81,515,253	83,613,727
	<p><b>INDIKATOR KRO</b> - Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal</p>	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	

067.09	<b>Eselon 1</b> Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Program	1,787,913,120	1,841,183,665	1,896,052,274	1,952,567,215
CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1,661,901,615	1,711,426,322	1,762,436,722	1,814,977,560
	<b>Sasaran Program</b> Terpenuhinya indeks desa yang berkembang dan mandiri <b>Indikator Kinerja Program</b>				
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten <b>Indikator Kinerja Program</b> Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Tingkat kepuasan stakeholders terhadap hasil layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang Berkinerja Baik  Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang Mampu Melakukan Pendampingan Masyarakat Perdesaan	3  3  99  87	3  3  100  88	3  3  100  88	3  3  100  88
6608	<b>KEGIATAN</b> Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  <b>SASARAN KEGIATAN</b> Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang terkontrak untuk melakukan pendampingan - Jumlah pendamping desa yang bersertifikasi - Persentase pendamping desa dan perdesaan dengan kinerja baik <b>KRO</b>	1,542,999,020	1,589,288,986	1,636,967,647	1,686,076,679
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1,542,999,020	1,589,288,986	1,636,967,647	1,686,076,679
6467	<b>KEGIATAN</b> Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  <b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kapasitas SDM desa, daerah tertinggal dan transmigrasi  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase SDM penggiat/ kader desa yang mendapatkan sertifikat pelatihan <b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	46,372,595	47,431,441	48,522,011	49,645,404
		87 Persentase	88 Persentase	89 Persentase	0 Persentase (%)

	<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p>	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen
	<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang berkontrak untuk melakukan pendampingan</p> <p>- Jumlah pendamping desa yang bersertifikasi</p> <p>- Persentase pendamping desa dan perdesaan dengan kinerja baik</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	99 Persen (%)	98 Persen (%)	98 Persen (%)	98 Persen (%)
		10000 Orang	10000 Orang	10000 Orang	10000 Orang
		99 Persen (%)	100 Persen (%)	100 Persen (%)	100 Persen (%)
	<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p><b>KRO</b></p>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
ABN	Kebijakan Bidang Sosial	14,283,448	14,618,324	14,963,247	15,318,537
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<p><b>KRO</b></p> <p>Pelatihan Bidang Sosial</p>	30,812,113	46,128,758	47,192,912	48,289,086
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<p><b>KRO</b></p> <p>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</p>	1,277,034	47,431,441	48,522,011	49,645,404
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
6476	<p><b>KEGIATAN</b></p> <p>Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	72,530,000	74,705,895	76,947,064	79,255,477
	<p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Desa Digital yang dikembangkan melalui Akademi Desa 4.0</p>				
	<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Jumlah Orang yang mengakses Platform Akademi Desa 4.0</p>	32000 Orang	32000 Orang	32000 Orang	32000 Orang
	<p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p> <p>Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p>				
	<p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <p>- Persentase pendamping desa yang bersertifikat mengikuti peningkatan kapasitas</p> <p><b>KRO</b></p>	45 Persen (%)	100 Persen (%)	100 Persen (%)	100 Persen (%)
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	72,530,000	74,705,895	76,947,064	79,255,477
	<b>INDIKATOR KRO</b>				

WA	<b>Program</b> Program Dukungan Manajemen	126,011,505	129,757,343	133,615,552	137,589,655
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan <b>Indikator Kinerja Program</b>				
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten <b>Indikator Kinerja Program</b> Tingkat Kepuasan Stakeholder Terhadap Hasil Layanan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pegawai dan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Tingkat kepuasan stakeholders terhadap hasil layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	3  3	3  3	3  3	3  3
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya SDM Aparatur Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan <b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase pejabat fungsional tertentu yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan	5	10	10	10
	<b>Sasaran Program</b> Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi <b>Indikator Kinerja Program</b> Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	70.5	71	71.5	72
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi <b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	82.75	83	83.5	84
6459	<b>KEGIATAN</b> Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  <b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya pelayanan publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkualitas <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Atas Pelayanan Teknis dan Dukungan Manajemen <b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	115,628,465         3 Nilai   PIEDP Nilai	119,072,084         3 Nilai   PIE Nilai	122,619,025         3 Nilai   PIE Nilai	126,272,479         3 Nilai   PIE Nilai

	/Tim Penilai PIPK UKE I				
	- Nilai SAKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	70.5 Nilai	71 Nilai	71.5 Nilai	72 Nilai
	- Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	77 Nilai	78 Nilai	78 Nilai	78 Nilai
	- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat	87 Nilai	87 Nilai	87 Nilai	87 Nilai
	- Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>				
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM	82.75 Persen (%)	83 Persen (%)	83.5 Persen (%)	84 Persen (%)
	- Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	10 Persen (%)	11 Persen (%)	11 Persen (%)	11 Persen (%)
	- Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	35 Persen (%)	36 Persen (%)	37 Persen (%)	38 Persen (%)
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>				
	Tersedianya Kebijakan dan Regulasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Jumlah Bahan Kebijakan dan Regulasi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang Ditetapkan pada Tahun yang Bersangkutan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	<b>KRO</b>				
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	923,144	952,541	982,821	1,014,009
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,321,533	104,272,327	107,390,820	110,602,948
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2,104,379	106,450,055	109,644,100	112,934,044
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	7,716,108	114,397,417	117,829,651	121,364,931
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KRO</b>				
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,563,301	119,072,084	122,619,025	126,272,479
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KEGIATAN</b>				
6460	Pelatihan dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara	10,383,040	10,685,259	10,996,527	11,317,176

	<p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya Kompetensi ASN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Struktural /Fungsional yang lulus dan bersertifikat - Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang Lulus dan Bersertifikat</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya Bahan Kebijakan dan Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional Tertentu yang Disusun</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya Fungsional Tertentu yang Kompeten</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi - Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Ditingkatkan Kapasitasnya - Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit)</p> <p><b>KRO</b> Layanan Manajemen SDM Internal</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	8.33 Persen (%) 14.07 Persen (%)	10.86 Persen (%) 11.30 Persen (%)	10.86 Persen (%) 11.30 Persen (%)	10.86 Persen (%) 11.30 Persen (%)
	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	
	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
EBC	100 Persen (%) 75 Persen (%) 100 Persen (%)	100 Persen (%) 75 Persen (%) 100 Persen (%)	100 Persen (%) 75 Persen (%) 100 Persen (%)	100 Persen (%) 75 Persen (%) 100 Persen (%)	
	10,383,040	10,685,259	10,996,527	11,317,176	
067.10	<b>Eselon 1</b> Sekretariat Jenderal	221,170,000	225,373,033	229,702,123	234,161,153
CT	Program Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	15,000,000	15,449,998	15,913,498	16,390,902
	<b>Sasaran Program</b> Terpenuhinya indeks desa yang berkembang dan mandiri <b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase Kegiatan Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan (Project Appraisal Document)	100	100		
6473	<b>KEGIATAN</b> Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Perencanaan dan Kerja Sama  <b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase dokumen perencanaan, kinerja, dan anggaran yang disusun tepat waktu - Persentase kerjasama program/kegiatan yang teranggarkan dalam dokumen perencanaan	15,000,000	15,449,998	15,913,498	16,390,902
	100 Persen (%) 90 Persen (%)	100 Persen (%) 90 Persen (%)	0 Persen (%) 0 Persen (%)	0 Persen (%) 0 Persen (%)	

PEA	<b>KRO</b> Koordinasi  <b>INDIKATOR KRO</b>	15,000,000	15,449,998	15,913,498	16,390,902
WA	<b>Program</b> <b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>206,170,000</b>	<b>209,923,035</b>	<b>213,788,625</b>	<b>217,770,251</b>
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya layanan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana dalam mendukung reformasi birokrasi <b>Indikator Kinerja Program</b> Nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi  Indeks Penerapan Sistem Merit Berdasarkan Instrumen Penilaian Penerapan Sistem Merit  Indeks kesehatan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi  Tingkat penerapan pengendalian intern Sekretariat Jenderal  Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal	100  80  78  4  3  88	100  85  80  4  3  90		
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan <b>Indikator Kinerja Program</b> Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi  Persentase terpenuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kementerian berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN )  Persentase penurunan jumlah komplain stakeholders terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa	93  95  60	94  100  50		
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya layanan dukungan regulasi, pertimbangan hukum dan advokasi hukum <b>Indikator Kinerja Program</b> Presentase regulasi yang ditetapkan sesuai mandat dalam peraturan perundang-undangan  Persentase penanganan permasalahan hukum (litigasi, non-litigasi, dan pemberian pertimbangan hukum)	100  100	100  100		
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya kinerja penata kelolaan anggaran dan keuangan <b>Indikator Kinerja Program</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi  Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Desa PDDT	WTP (4)  94	WTP (4)  95		
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi				

	<b>Indikator Kinerja Program</b> Nilai SAKIP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	78	80		
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya kinerja perencanaan dan penganggaran <b>Indikator Kinerja Program</b> Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	87	90		
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya kepuasan atas layanan dukungan manajemen <b>Indikator Kinerja Program</b> Tingkat kepuasan aparatur Kementerian Desa PDPTT atas pelayanan dukungan manajemen	4	4		
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik <b>Indikator Kinerja Program</b> Nilai Keterbukaan Informasi publik Kementerian Desa PDPTT	95	95		
5463	<b>KEGIATAN</b> Penyelenggaraan Legislasi dan Advokasi Hukum  <b>SASARAN KEGIATAN</b> Terselesaikannya tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti <b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya layanan dukungan regulasi, pertimbangan hukum dan advokasi hukum <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase rekomendasi hasil evaluasi produk hukum yang ditindaklanjuti - Presentase regulasi yang ditetapkan sesuai mandat dan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan - Persentase tanggapan positif masyarakat terhadap jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta peraturan Perundang-undangan melalui Daring - Tingkat kepuasan terhadap sosialisasi produk hukum - Persentase penanganan permasalahan hukum (litigasi, non-litigasi, dan pemberian pertimbangan hukum) - Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan hukum <b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya kebijakan dan regulasi Hukum <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan <b>KRO</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal <b>INDIKATOR KRO</b>	5,972,000	6,159,171	6,351,942	6,550,517
EBA		5,972,000	6,159,171	6,351,942	6,550,517
5464	<b>KEGIATAN</b> Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik  <b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah dokumen blue print institutional branding Kementerian	12,335,000	12,701,204	13,078,398	13,466,912
		1 (Reviu)	1 (Reviu)	1 (Reviu)	1 (Reviu)

	Desa PDTT yang ditetapkan				
	- Persentase kegiatan Kementerian yang terpublikasikan sesuai dengan dokumen blue print institutional branding Kementerian Desa PDTT	76 Persen (%)	76.5 Persen (%)	76.5 Persen (%)	76.5 Persen (%)
	- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	79 Persen (%)	81 Persen (%)	83 Persen (%)	85 Persen (%)
	- Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi MoU	20 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen
	- Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan kehumasan	3.56 Tingkat	3.57 Tingkat	3.58 Tingkat	3.59 Tingkat
	- Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	3.15 Tingkat	3.15 Tingkat	3.15 Tingkat	3.15 Tingkat
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>				
	Tersedianya kebijakan dan regulasi Hubungan Masyarakat				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Hubungan Masyarakat yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	<b>KRO</b>				
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,335,000	12,701,204	13,078,398	13,466,912
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
	<b>KEGIATAN</b>				
5465	<b>Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama</b>	<b>8,388,755</b>	<b>8,625,853</b>	<b>8,870,061</b>	<b>9,121,603</b>
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>				
	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Persentase dokumen perencanaan, kinerja, dan anggaran di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang disusun tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen (%)	100 Persen (%)	100 Persen (%)	0 Persen (%)
	- Persentase MoU yang ditindaklanjuti dalam kerja sama Program/Kegiatan	85 Persen (%)	90 Persen (%)	95 Persen (%)	0 Persen (%)
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	78 Nilai	80 Nilai	82 Nilai	0 Nilai
	- Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100 Persen (%)	100 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
	- Nilai rata-rata implementasi Manajemen Resiko di seluruh Unit Kerja Eselon I	4 Nilai	4 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
	- Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal	90 Persen (%)	100 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>				
	Meningkatnya kinerja perencanaan dan penganggaran				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal	90 Nilai	92 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>				
	Tersedianya kebijakan dan regulasi Perencanaan Program dan Anggaran				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi perencanaan program dan anggaran yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>				
	Meningkatnya kepuasan atas layanan dukungan manajemen				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	- Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan Perencanaan	4 Nilai	4 Nilai	0 Nilai	0 Nilai

EBD	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	8,388,755	8,625,853	8,870,061	9,121,603
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
5466	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	22,265,300	22,938,287	23,631,463	24,345,445
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya layanan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana dalam mendukung reformasi birokrasi				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Persentase SOP yang ditetapkan dan diimplementasikan	85 Persen (%)	90 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
	- Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal	88 Persen (%)	90 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
	- Persentase pemenuhan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan (the right man on the right place in the right time)	79 Persen (%)	80 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
	- Persentase pemenuhan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dokumen Man Power Planning	79 Persen (%)	80 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
	- Nilai rata-rata kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi	79 Nilai	80 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
	- Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan kepegawaian	4 Nilai	4 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Tersedianya kebijakan dan regulasi Kepegawaian dan Organisasi				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Kepegawaian dan Organisasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,883,898	1,938,830	1,995,409	2,053,687
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBC	<u>KRO</u> Layanan Manajemen SDM Internal	20,381,402	22,938,287	23,631,463	24,345,445
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	- Terwujudnya Layanan Bidang SDM dan Umum yang baik	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
	<u>KEGIATAN</u>				
6455	Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Umum	157,208,945	159,498,520	161,856,761	164,285,774
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Persentase penurunan jumlah complain stakeholders terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa	60 Persen (%)	50 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
	- Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan umum dan pengadaan	4 Tingkat	4 Tingkat	0 Tingkat	0 Tingkat
	- Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN) yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
	- Presentase terpenuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kementerian berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)	95 Persen (%)	100 Persen (%)	0 Persen (%)	0 Persen (%)
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Tersedianya kebijakan dan regulasi Umum dan Layanan Pengadaan				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Umum dan Layanan Pengadaan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen

	<p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kinerja penata kelolaan anggaran dan keuangan</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I</li> <li>- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal</li> <li>- Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan Penatausahaan BMN</li> </ul> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya kebijakan dan regulasi Keuangan dan Barang Milik Negara</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Keuangan dan Barang Milik Negara yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan</li> </ul>	PIE Opini	PIE Opini	0 Opini	0 Opini
		92 Nilai	93 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
		4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai	0 Nilai
CAN	<p><b>KRO</b> Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	873,600	873,600	873,600	873,600
EBA	<p><b>KRO</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	147,322,027	150,234,883	152,335,308	154,498,754
EBB	<p><b>KRO</b> Layanan Sarana dan Prasarana Internal</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	4,850,534	155,221,869	157,462,841	159,771,050
EBD	<p><b>KRO</b> Layanan Manajemen Kinerja Internal</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	4,162,784	159,498,520	161,856,761	164,285,774
067.11	<p><b>Eselon 1</b> <b>BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI</b></p> <p>Program</p>	131,339,762	134,140,203	137,024,627	139,995,673
CT	<p>Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi</p>	53,000,000	53,982,060	54,993,583	56,035,468
	<p><b>Sasaran Program</b> Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten</p> <p><b>Indikator Kinerja Program</b></p>				
	<p><b>Sasaran Program</b> Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, inovasi, serta data dan informasi</p> <p><b>Indikator Kinerja Program</b></p> <p>Persentase produk atau dokumen perencanaan Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diimplementasikan</p>	100	100	100	100
	<p>Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p>	4	4	4	4

	Persentase dokumen kebijakan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, dan Teknologi Digital yang diimplementasikan	90	95	95	95
	Persentase Kebutuhan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terpenuhi	80	85	85	85
	Persentase desa yang mendapatkan layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi	100	100	100	100
6465	<b>KEGIATAN</b> Pengembangan Kebijakan, Daya Saing, Teknologi dan Inovasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	4,790,000	4,927,869	5,069,880	5,216,150
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya Kebijakan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, serta Teknologi Digital				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah dokumen Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan - Persentase Kebijakan Pengembangan kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tinggi serta Teknologi Digital yang diimplementasikan	1 Dokumen 80 Persen (%)	1 Dokumen 90 Persen (%)	1 Dokumen 90 Persen (%)	1 Dokumen 90 Persen (%)
ABP	<b>KRO</b> Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4,290,000	4,412,870	4,539,434	4,669,791
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
AEC	<b>KRO</b> Kerja sama	500,000	4,927,869	5,069,880	5,216,150
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
6466	<b>KEGIATAN</b> Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	5,000,000	5,064,192	5,130,306	5,198,419
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya dokumen perencanaan induk, pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah produk atau dokumen perencanaan induk Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditetapkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Terimplementasinya dokumen perencanaan induk, pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase produk atau dokumen perencanaan induk Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diimplementasikan	100 Persen (%)	100 Persen (%)	100 Persen (%)	100 Persen (%)
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya kebijakan dan regulasi Keterpaduan Rencana				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Keterpaduan Rencana yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen

ABP	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4,750,000	4,806,693	4,865,083	4,925,239
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
BMA	<u>KRO</u> Data dan Informasi Publik	250,000	5,064,192	5,130,306	5,198,419
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
6477	<u>KEGIATAN</u> Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	43,210,000	43,989,999	44,793,397	45,620,899
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Terwujudnya Desa Digital melalui Smart Village				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah desa yang mendapatkan Pengembangan Desa Digital melalui Smart Village	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa
PBP	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	43,210,000	43,989,999	44,793,397	45,620,899
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui Smart Village	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	
WA	<b>Program</b> Program Dukungan Manajemen	78,339,762	80,158,143	82,031,044	83,960,205
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan <b>Indikator Kinerja Program</b>				
	<b>Sasaran Program</b> Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, inovasi, serta data dan informasi <b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase produk atau dokumen perencanaan Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diimplementasikan	100	100	100	100
	Jumlah rekomendasi hasil kajian yang diimplementasikan oleh unit kerja Jumlah rekomendasi hasil kajian yang diimplementasikan oleh unit kerja	85	90	90	90
	Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE)	4	4	4	4
	Persentase Kebutuhan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terpenuhi	80	85	85	85
	Persentase desa yang mendapatkan layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi	100	100	100	100
	<b>Sasaran Program</b> Terwujudnya Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi <b>Indikator Kinerja Program</b> Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	100	100	100	100

	<p><b>Sasaran Program</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p><b>Indikator Kinerja Program</b> Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	88	90	92	94
5479	<p><b>KEGIATAN</b> Pengelolaan Data dan Informasi Internal</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Tersedianya layanan data dan informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah layanan data dan informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p>	26,041,747	26,288,326	26,542,295	26,803,902
BMA	<p><b>KRO</b> Data dan Informasi Publik</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	9,295,704	9,295,704	9,295,704	9,295,704
CBT	<p><b>KRO</b> Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	3,750,000	13,045,704	13,045,704	13,045,704
CCL	<p><b>KRO</b> OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	4,950,000	17,995,704	17,995,704	17,995,704
EBA	<p><b>KRO</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b> - Jumlah layanan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi</p>	5,915,996	24,094,378	24,282,529	24,476,343
FAB	<p><b>KRO</b> Sistem Informasi Pemerintahan</p> <p><b>INDIKATOR KRO</b></p>	2,130,047	26,288,326	26,542,295	26,803,902
6458	<p><b>KEGIATAN</b> Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya pelayanan publik Badan Pengembangan dan Informasi yang berkualitas</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan dan Informasi atas dukungan manajemen</p> <p><b>SASARAN KEGIATAN</b> Jumlah kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan dan Informasi</p> <p><b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan dan</p>	52,298,015	53,869,817	55,488,749	57,156,303
		4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai
		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen

	Informasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan				
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Terwujudnya Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan dan Informasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I - Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PIE Opini 100 Nilai 91 Nilai 94 Nilai 4 Nilai	PIE Opini 100 Nilai 92 Nilai 95 Nilai 4 Nilai	PIE Opini 100 Nilai 93 Nilai 96 Nilai 4 Nilai	PIE Opini 100 Nilai 94 Nilai 97 Nilai 4 Nilai
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> - Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun - Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	88 Persen (%) 50 Persen (%) 50 Persen (%)	90 Persen (%) 60 Persen (%) 60 Persen (%)	92 Persen (%) 70 Persen (%) 70 Persen (%)	94 Persen (%) 80 Persen (%) 80 Persen (%)
CAN	<b>KRO</b> Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	850,000	875,500	901,765	928,817
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
EBA	<b>KRO</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal	38,308,480	40,345,143	41,567,393	42,826,328
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
EBB	<b>KRO</b> Layanan Sarana dan Prasarana Internal	150,000	40,499,643	41,726,528	42,990,237
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
EBC	<b>KRO</b> Layanan Manajemen SDM Internal	6,433,200	47,146,001	48,592,439	50,082,292
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
EBD	<b>KRO</b> Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,556,335	53,869,817	55,488,749	57,156,303
	<b>INDIKATOR KRO</b>				

F. RINCIAN BIAYA	
JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2023
1	2
<b>Eselon 1</b>	
<b>067.02-2023 - Inspektorat Jenderal</b>	49,674,000
<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>	
NON_OPERASIONAL	24,785,222
OPERASIONAL	24,888,778
<b>2. JENIS BELANJA</b>	
BELANJA PEGAWAI	20,612,928
BELANJA MODAL	1,152,000
BELANJA HIBAH	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN BARANG	27,909,072
BELANJA LAIN-LAIN	0
<b>3. SUMBER DANA</b>	
RM	49,674,000
HIBAH VALAS	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
RPLN	0
BLU	0
HDN	0
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	0
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2023
1	2
PDN	0
SBSN-PBS	0
SA-BLU	0
PDN	0
<b>Eselon 1</b>	
<b>067.03-2023 - Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan</b>	234,356,528
<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>	
NON_OPERASIONAL	195,093,950
OPERASIONAL	39,262,578
<b>2. JENIS BELANJA</b>	
BELANJA PEGAWAI	30,098,101
BELANJA MODAL	1,000,000
BELANJA HIBAH	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN BARANG	203,258,427
BELANJA LAIN-LAIN	0
<b>3. SUMBER DANA</b>	
RM	186,473,108
HIBAH VALAS	7,883,420
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
RPLN	0
BLU	0
HDN	0
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	40,000,000
STM	0

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2023
1	2
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
SA-BLU	0
PDN	0
<b>Eselon 1</b>	
<b>067.04-2023 - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</b>	230,459,248
<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>	
OPERASIONAL	42,610,560
NON_OPERASIONAL	187,848,688
<b>2. JENIS BELANJA</b>	
BELANJA PEGAWAI	30,457,039
BELANJA HIBAH	0
BELANJA MODAL	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN BARANG	200,002,209
BELANJA LAIN-LAIN	0
<b>3. SUMBER DANA</b>	
RM	159,381,068
HIBAH VALAS	5,000,000
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
RPLN	0
BLU	0
HDN	0

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2023
1	2
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	66,078,180
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
SA-BLU	0
PDN	0
<b>Eselon 1</b>	
<b>067.06-2023 - Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</b>	90,564,634
<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>	
OPERASIONAL	38,195,546
NON_OPERASIONAL	52,369,088
<b>2. JENIS BELANJA</b>	
BELANJA PEGAWAI	28,023,424
BELANJA HIBAH	0
BELANJA MODAL	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN BARANG	62,541,210
BELANJA LAIN-LAIN	0
<b>3. SUMBER DANA</b>	
RM	90,564,634
HIBAH VALAS	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	0

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2023
1	2
RPLN	0
BLU	0
HDN	0
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	0
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
SA-BLU	0
PDN	0
<b>Eselon 1</b>	
<b>067.07-2023 - Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>251,553,559</b>
<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>	
OPERASIONAL	59,626,270
NON_OPERASIONAL	191,927,289
<b>2. JENIS BELANJA</b>	
BELANJA PEGAWAI	40,078,509
BELANJA MODAL	16,146,639
BELANJA HIBAH	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN BARANG	195,328,411
BELANJA LAIN-LAIN	0

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2023
1	2
<b>3. SUMBER DANA</b>	
RM	251,553,559
HIBAH VALAS	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
RPLN	0
BLU	0
HDN	0
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	0
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
SA-BLU	0
PDN	0
<b>Eselon 1</b>	
<b>067.09-2023 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</b>	1,787,913,120
<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>	
OPERASIONAL	97,589,440
NON_OPERASIONAL	1,690,323,680
<b>2. JENIS BELANJA</b>	
BELANJA PEGAWAI	64,159,256
BELANJA MODAL	8,464,243
BELANJA HIBAH	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2023
1	2
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN BARANG	1,715,289,621
BELANJA LAIN-LAIN	0
<b>3. SUMBER DANA</b>	
RM	1,715,383,120
HIBAH VALAS	0
RPLN	72,530,000
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
BLU	0
HDN	0
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	0
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
SA-BLU	0
PDN	0
<b>Eselon 1</b>	
<b>067.10-2023 - Sekretariat Jenderal</b>	221,170,000
<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>	
NON_OPERASIONAL	82,221,049
OPERASIONAL	138,948,951
<b>2. JENIS BELANJA</b>	
BELANJA PEGAWAI	52,907,720
BELANJA MODAL	5,724,134
BELANJA HIBAH	0

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2023
1	2
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN BARANG	162,538,146
BELANJA LAIN-LAIN	0
<b>3. SUMBER DANA</b>	
RM	206,170,000
HIBAH VALAS	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
RPLN	0
BLU	0
HDN	0
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	15,000,000
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
SA-BLU	0
PDN	0
<b>Eselon 1</b>	
<b>067.11-2023 - BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI</b>	131,339,762
<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>	
NON_OPERASIONAL	95,111,282
OPERASIONAL	36,228,480

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2023
1	2
<b>2. JENIS BELANJA</b>	
BELANJA PEGAWAI	27,496,975
BELANJA MODAL	6,880,047
BELANJA HIBAH	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN BARANG	96,962,740
BELANJA LAIN-LAIN	0
<b>3. SUMBER DANA</b>	
RM	88,129,762
HIBAH VALAS	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
RPLN	0
BLU	0
HDN	0
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	43,210,000
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
SA-BLU	0
PDN	0

<b>1. TOTAL KELOMPOK BIAYA K/L</b>	
OPERASIONAL	477,350,603
NON_OPERASIONAL	2,519,680,248
<b>2. TOTAL JENIS BELANJA K/L</b>	
BELANJA BARANG DAN BARANG	2,663,829,836
BELANJA PEGAWAI	293,833,952
BELANJA MODAL	39,367,063
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA HIBAH	0
BELANJA LAIN-LAIN	0
<b>3. TOTAL SUMBER DANA K/L</b>	
RM	2,747,329,251
PINJ. VALAS	164,288,180
RPLN	72,530,000
HIBAH VALAS	12,883,420
L.COST/RMP	0
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
HDN	0
BLU	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
SA-BLU	0
PDN	0

**G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN.**

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	2023	2024	2025	2026
067.09.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	491,497	0	0	0
067.10.WA	Program Dukungan Manajemen	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	1,716,005	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	<b>TOTAL</b>	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	2,207,502	1,000,000	1,000,000	1,000,000

Jakarta, November 2022

Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi

Republik Indonesia,



*Abdul Halim Iskandar*  
Abdul Halim Iskandar